

DAMPAK KEBIJAKAN EKONOMI DI SEKTOR AGROINDUSTRI TERHADAP KEMISKINAN DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN RUMAH TANGGA DI INDONESIA: Analisis Simulasi dengan Sistem Neraca Sosial Ekonomi

Impact of Economic Agro Industry Policy on Poverty and Income Distribution: Simulation Analysis Using Socioeconomic Balance System Approach

Sri Hery Susilowati¹, Bonar, M. Sinaga², Wilson, H. Limbong², dan Erwidodo³

¹*Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Jl. A. Yani 70 Bogor 16161*

²*Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB, Jalan Raya Pajajaran, Bogor*

³*Departemen Perdagangan, Jalan M. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat*

ABSTRACT

The objective of this study is to analyze the impact of economic policy in agroindustry on household poverty and income distribution. Within the Social Accounting Matrix (SAM) framework, agroindustry sector is disaggregated into food and non food agroindustry. This study used Susenas data to analyze household poverty and income distribution. The result shows that export, investment, and tax incentive policy in agroindustry have positive impact on household poverty and income distribution, while government expenditure policy give less impact. Policy in non food agroindustry have greater impact on poverty reduction while policy in food agroindustry result greater impact on income distribution improvement. Investment policy in priority industries of agroindustry (rubber, pulp, bamboo and rattan, cigarette, beverage and fisheries food industries) is the most effective policy to reduce household poverty as well as to improve household income distribution.

Key words: *agroindustry, poverty, income distribution, Social Accounting Matrix*

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan ekonomi di sektor agroindustri terhadap kemiskinan dan distribusi pendapatan rumah tangga. Analisis menggunakan Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) yang didisagregasi ke dalam agroindustri makanan dan nonmakanan. Analisis kemiskinan dan distribusi pendapatan rumah tangga menggunakan data SUSENAS. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan peningkatan ekspor, investasi, dan insentif pajak di sektor agroindustri berdampak menurunkan tingkat kemiskinan dan memperbaiki distribusi pendapatan rumah tangga, sedangkan kebijakan peningkatan pengeluaran pembangunan pemerintah di sektor agroindustri kurang memberikan dampak positif. Kebijakan ekonomi di sektor agroindustri nonmakanan berdampak lebih besar dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Sedangkan kebijakan ekonomi di sektor agroindustri makanan berdampak lebih besar

DAMPAK KEBIJAKAN EKONOMI DI SEKTOR AGROINDUSTRI TERHADAP KEMISKINAN DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN RUMAH TANGGA DI INDONESIA : Analisis Simulasi dengan Sistem Neraca Sosial Ekonomi
Sri Hery Susilowati, Bonar M. Sinaga, Wilson H. Limbong, Erwidodo

memperbaiki distribusi pendapatan rumah tangga. Kebijakan ekonomi di sektor agroindustri prioritas (industri karet, industri kayu lapis, bambu dan rotan, industri rokok, industri minuman, dan industri makanan sektor perikanan) merupakan kebijakan yang paling efektif menurunkan tingkat kemiskinan dan memperbaiki distribusi pendapatan rumah tangga.

Kata kunci : *agroindustri, kemiskinan, distribusi pendapatan, SNSE*

PENDAHULUAN

Strategi pembangunan yang dilakukan pada masa Orde Baru telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar lebih 7 persen per tahun dibarengi dengan proses transformasi ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri. Namun, keberhasilan proses industrialisasi lebih banyak dinikmati oleh golongan atas sehingga memunculkan fenomena *trade off* terhadap pemerataan. Hal ini terlihat dari perbandingan pendapatan per kapita buruh tani terhadap rumah tangga bukan pertanian golongan atas di kota pada tahun 1985 sebesar 1: 3,7 meningkat menjadi 1: 9,5 pada saat krisis ekonomi tahun 1998 (BPS, 2002). Tingkat kemiskinan juga tidak berkurang secara nyata yang pada tahun 1985 mencapai 24,2 persen dan pada tahun 2006 masih sebesar 17,75 persen dari total penduduk atau sekitar 39,1 juta jiwa. Sekitar 69 persen dari total penduduk miskin tersebut berada di perdesaan dan mengandalkan pendapatan dari sektor pertanian. *Millenium Summit* tahun 2000 menargetkan bahwa pada tahun 2015 Indonesia harus mampu mengurangi separuh jumlah penduduk miskin. Oleh karena itu, aspek kemiskinan menjadi tantangan dan permasalahan nasional yang cukup serius.

Masalah kemiskinan dan pemerataan seperti di atas tidak terlepas dari kebijakan pembangunan ekonomi yang mengarah kepada strategi industrialisasi yang hanya berorientasi pada pertumbuhan. Industri yang dikembangkan adalah industri-industri yang bersifat *foot lose industry*, yakni industri padat modal yang tidak berdasarkan pada sumberdaya dalam negeri tetapi tergantung pada sumberdaya impor sehingga potensi sumberdaya pertanian dalam negeri tidak dimanfaatkan secara optimal. Pembangunan industri yang demikian menghasilkan perekonomian nasional yang rapuh, tidak efisien, rentan terhadap gejolak ekonomi dunia, serta kurang menghasilkan efek tetesan ke bawah (*trickle down effect*) bagi sebagian besar masyarakat golongan pendapatan rendah.

Seandainya kebijakan pembangunan ekonomi nasional lebih diarahkan ke pengembangan industri yang berbasis pertanian dalam negeri, maka diyakini bahwa pertumbuhan ekonomi akan ditransmisikan ke seluruh sektor perekonomian lainnya dan berdampak positif bagi rumah tangga pedesaan. Hal ini terjadi karena keterkaitan antara sektor agroindustri dengan sektor pertanian primer akan menciptakan konsumsi terhadap produk industri yang dihasilkan

dan menciptakan permintaan investasi sektor pertanian primer sebagai penyedia bahan baku industri. Peningkatan produksi di sektor pertanian akan meningkatkan pendapatan rumah tangga buruh tani dan petani serta rumah tangga nonpertanian golongan bawah lainnya, seperti buruh angkut, transportasi, dan penyedia jasa lain. Lebih lanjut, hal ini akan berdampak mengurangi kesenjangan pendapatan antara rumah tangga golongan rendah dan golongan atas. Peningkatan pendapatan buruh tani juga akan berdampak mengurangi kemiskinan karena selama ini kantong kemiskinan berada di sektor pertanian dan pedesaan. Pentingnya peran sektor agroindustri dapat dilihat melalui besarnya nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja yang diciptakan oleh agroindustri. Dari industri makanan saja (belum termasuk agroindustri nonmakanan) dapat menyumbang nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja masing-masing sebesar 23,3 dan 21,4 persen dari total nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja di sektor industri pada tahun 2004. Namun, selama ini sektor agroindustri kurang menunjukkan perkembangan berarti yang terlihat dari jumlah perusahaan agroindustri makanan (skala besar dan sedang) yang hanya bertambah 34 perusahaan atau 0,74 persen selama sepuluh tahun terakhir (BPS, 2006).

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dampak berbagai kebijakan ekonomi di sektor agroindustri terhadap kemiskinan dan distribusi pendapatan rumah tangga.. Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan peningkatan investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor, insentif pajak, dan redistribusi pendapatan rumah tangga dari golongan atas ke golongan rendah.

METODOLOGI

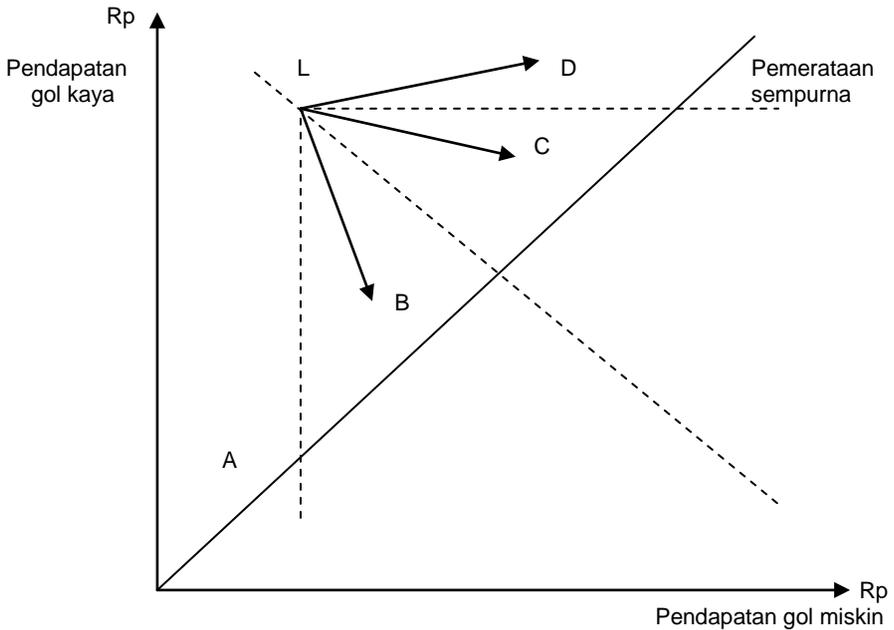
Kerangka Pemikiran

Pertumbuhan vs Ketidakmerataan

Masalah kemiskinan dan ketidakmerataan pendapatan sampai sekarang tetap menjadi pembahasan terutama di negara-negara berkembang. Dampak dari pembangunan ekonomi terhadap golongan miskin masih menjadi perdebatan. Sebagian berasumsi bahwa meningkatnya pendapatan per kapita akibat pembangunan akan menjadikan setiap orang lebih sejahtera. Apabila sekelompok masyarakat belum memperoleh manfaat, hal itu hanya masalah waktu sampai manfaat pembangunan tersebut betul-betul menetes kepada mereka. Namun sebaliknya pihak lain tetap meragukan apakah dampak pembangunan betul-betul dapat dinikmati oleh kelompok miskin.

Secara umum hubungan antara pertumbuhan dan pemerataan dapat dinyatakan melalui Gambar 1 (Kasliwal, 1995). Gambar tersebut menunjukkan pendapatan masyarakat dibedakan menjadi dua, yaitu pendapatan kelompok kaya (50% populasi dengan pendapatan tertinggi) dan pendapatan kelompok

miskin (50% populasi dengan pendapatan lebih rendah). Distribusi awal berada di titik L yang bias kepada kelompok kaya. Kebijakan dilakukan agar distribusi mengarah kepada garis pemerataan pendapatan. Namun, kebijakan redistribusi pada umumnya juga akan mengubah total pendapatan. Kebijakan yang mengakibatkan distribusi pendapatan berada di wilayah A adalah kebijakan yang tidak diinginkan karena kelompok kaya akan menjadi miskin dan kelompok miskin menjadi semakin miskin. Pada wilayah B, kelompok miskin akan memperoleh manfaat yang lebih rendah dibanding kerugian yang dialami kelompok kaya sehingga total pendapatan menurun. Jika redistribusi bergerak ke wilayah C, yaitu diatas garis pendapatan konstan, terdapat peluang mengalami pertumbuhan diikuti pemerataan karena total pendapatan meningkat. Pada wilayah D, redistribusi akan mengalami *pareto superior* karena masing-masing kelompok memperoleh peningkatan pendapatan.



Gambar 1. Pertumbuhan Pendapatan vs Ketidakmerataan

Konsep distribusi pendapatan dapat dibedakan menurut dua aliran ekonomi. **Pertama, Mahzab Klasik (*Orthodox*)** yang berpegang pada konsep keseimbangan alokasi sumberdaya dan konsep pasar bebas, dimana harga menjadi acuan dalam proses pertukaran. Perbedaan kondisi antarsektor akan menyebabkan pertukaran dan alokasi sumberdaya secara efisien tanpa ada campur tangan pemerintah (konsep pasar bebas) hingga mencapai kondisi

pareto optimal. Pertukaran tersebut pada hakekatnya merupakan proses pembangunan (Herrick dan Kindleberger, 1988; Arndt, 1987; Gillis *et al.*, 1987; Djojohadikusumo, 1994 dan Deliarnov, 1995).

Aspek distribusi pendapatan dibahas dengan penekanan pada masalah pembagian hasil produksi antara pemilik modal dan pemilik tanah. Lewis (1954) dalam Gillis *et al.* (1987) membahas aspek ketidakmerataan (*inequality*) lebih mendalam. Dengan menggunakan konsep-konsep mahzab Klasik dan teori Malthus, Lewis mengembangkan model dua sektor dengan mengasumsikan tenaga kerja tersedia dengan jumlah berlebih dan pada tingkat upah subsisten yang tetap. Teori ini menyatakan bahwa ketidakmerataan pendapatan akan muncul pada awalnya dan akan menghilang setelah dicapai hasil pembangunan. Ada dua alasan meningkatnya ketidakmerataan pendapatan pada awal pertumbuhan. Pertama, kontribusi pemilik kapital meningkat pada saat peran sektor modern meningkat sehingga meningkatkan kesenjangan pendapatan antara pemilik modal dan buruh. Kedua, kesenjangan distribusi buruh sendiri juga meningkat dengan bertambahnya tenaga kerja (namun masih dalam jumlah yang masih sedikit) yang pindah dari tingkat upah sektor subsisten ke tingkat upah sektor modern yang lebih tinggi. Namun, ketidakmerataan tersebut berubah manakala seluruh surplus tenaga kerja diserap oleh sektor modern yang menyebabkan tenaga kerja berubah menjadi faktor produksi yang langka. Tingkat upah kemudian meningkat yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat ketidakmerataan sekaligus mengurangi tingkat kemiskinan. Setiap orang akan memperoleh manfaat apabila mereka menunggu proses pembangunan tersebut berlangsung sampai selesai. Peningkatan sementara dalam ketidakmerataan pendapatan hanya merupakan biaya untuk memperoleh manfaat proses pembangunan tersebut. Tanpa adanya campur tangan pemerintah pemerataan akan terjadi dengan sendirinya pada saat negara telah mencapai tingkat pembangunan dan pendapatan per kapita yang tinggi.

Kedua, Mahzab Strukturalis yang memandang pembangunan ekonomi sebagai transisi yang ditandai oleh suatu transformasi yang mengandung perubahan mendasar pada ekonomi yang disebut sebagai perubahan struktural. Perubahan struktural tersebut merupakan masa ketidakseimbangan yang dapat menyebabkan kesenjangan penyesuaian yang panjang (Arndt, 1987; Gillis *et al.*, 1987; Herrick dan Kindleberger, 1988 dan Djojohadikusumo, 1994). Aliran Strukturalis skeptis terhadap efektifitas mekanisme kekuatan harga dan meyakini bahwa perencanaan dan kontrol pemerintah dapat menanggulangi kegagalan pasar. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi negara-negara kurang maju tidak dapat diserahkan kepada mekanisme kekuatan pasar, tetapi pemerintah harus mengambil peranan aktif dengan menjalankan kebijakan untuk menanggulangi ketimpangan yang melekat pada keadaan ketidakseimbangan tersebut agar sistem pasar dan perkembangan harga dapat berjalan secara memadai

Berbeda dengan aliran Klasik yang percaya bahwa pemerataan pendapatan akan terjadi dengan sendirinya dengan meningkatnya pendapatan per kapita, aliran Strukturalis menganggap bahwa masalah distribusi pendapatan dan pemerataan harus dilakukan melalui intervensi pemerintah. Dalam hal ini terdapat dua pendekatan ekstrim dalam mencapai pertumbuhan dan pemerataan, yaitu Aliran Ekstrim (Radikal) Kanan atau aliran yang menganut paham Kapitalis yang memfokuskan pada pertumbuhan (*"grow first, then redistribute"*) dan Aliran Ekstrim Kiri atau aliran yang menganut paham Sosialis, yang memfokuskan pada masalah pemerataan (*"redistribute first, then grow"*). Sebagai alternatif dari dua aliran ekstrim tersebut, terdapat satu strategi yang beraliran moderat untuk mencapai pertumbuhan dan pemerataan secara bersama, yaitu redistribusi dengan pertumbuhan (*"redistribution with growth /RWG"*) yang dikembangkan oleh Bank Dunia (Chenery *et al.*, 1974).

Sasaran pembangunan ekonomi bagi Aliran Ekstrim Kanan bukan mengarah pada pemerataan yang lebih besar melalui mekanisme *trickle-down*, tetapi melalui pemusatan pendapatan pada masyarakat yang telah kaya. Produksi diatur secara efisien, kemudian baru didistribusi untuk memperoleh distribusi pendapatan yang diinginkan melalui transfer atau pajak yang diyakini tidak akan mendistorsi ekonomi. Namun, aliran ini telah gagal. Contoh empiris kegagalan tersebut adalah kebijakan pembangunan ekonomi di Brazil, dimana pertumbuhan ekonomi meningkat sangat cepat namun disertai dengan tingkat ketidakmerataan sangat tinggi dan perkembangan pengurangan tingkat kemiskinan yang sangat lambat. Pemilikan aset sangat terkonsentrasi, akses terhadap pendidikan sangat tidak merata, pembangunan industri maupun pertanian diutamakan pada skala usaha besar dan teknologi padat kapital.

Sebaliknya Aliran Ekstrim Kiri memiliki kebijakan *"redistribute first, then grow"*. Pemerintah mengambil alih pemilik modal dan pemilik tanah dengan membagikan aset mereka ke produsen skala kecil, yang seringkali melalui sistem pemilikan bersama. Kebijakan tersebut membawa dua dampak terhadap distribusi pendapatan. Pertama, dampak secara langsung, yaitu tingkat pemerataan pendapatan akan segera meningkat secara nyata. Kedua adalah dampak dalam jangka panjang. Apabila usaha-usaha berskala lebih kecil dan melalui pemilikan bersama tersebut dapat menghasilkan keuntungan besar dan dikelola secara efisien dan produktif, maka efek redistribusi tersebut akan meningkat. Namun apabila tidak dikelola secara produktif, pemilik awal akan kehilangan aset mereka dan pemilik baru tidak akan memperoleh manfaat secara proporsional. Negara yang termasuk dalam aliran ini adalah negara-negara Uni Soviet dan Republik Rakyat China (RRC). Kebijakan pembangunan berbasis industri yang dilakukan Uni Soviet adalah mengambil alih kekayaan yang seharusnya menjadi hak masyarakat secara umum, terutama petani, dan menekan konsumsi yang hasilnya diinvestasikan kembali ke sektor produktif. Dengan kebijakan tersebut, ketidakmerataan pendapatan masyarakat memang mengecil karena hasil pendapatan diambil oleh pemerintah.

Strategi mencapai pertumbuhan dan pemerataan pendapatan dewasa ini mengalami pergeseran paradigma, karena dua aliran ekstrim yang telah diuraikan diatas kurang disukai. Di banyak negara penganut Aliran Ekstrim Kanan, meskipun terjadi pertumbuhan pesat, masalah kemiskinan dan ketidakmerataan pendapatan juga masih menjadi masalah besar. Argumen bahwa ketimpangan pendapatan merupakan kondisi sementara yang tak terelakkan guna mencapai akumulasi kapital, memang memungkinkan terakumulasinya tabungan dan investasi yang lebih besar sehingga menciptakan laju pertumbuhan yang lebih cepat dan pada akhirnya menciptakan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita tinggi untuk didistribusikan ke masyarakat melalui program-program perpajakan dan subsidi. Namun bila waktu distribusi tiba, setiap usaha pendistribusian kembali pendapatan akan menurunkan laju pertumbuhan secara tajam. Karena perlambatan dianggap negatif, maka saat pendistribusian terpaksa ditunda dan terjadi penundaan secara terus menerus. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi akan terus melaju sementara ketimpangan pendapatan tidak membaik.

Sementara negara-negara penganut aliran ekstrim kiri pada umumnya mengalami tingkat pertumbuhan yang rendah, karena setiap usaha redistribusi akan menurunkan stok modal yang pada akhirnya menurunkan laju pertumbuhan. Oleh karena itu, harus ada cara bagaimana manfaat pertumbuhan ekonomi dapat didistribusikan, sehingga distribusi pendapatan meningkat sepanjang waktu dengan meningkatnya pertumbuhan. Konsep tersebut dikembangkan oleh World Bank, dinamakan redistribusi dengan pertumbuhan atau "*redistribution with growth/ RWG*" (Chenery *et al.*, 1974). Hanya melalui peningkatan GNP akan ada sesuatu yang berarti untuk bisa didistribusikan. Distribusi tidak dapat diharapkan sebagai produk sampingan dari pertumbuhan, melainkan harus diciptakan dari unsur kebijakan. Ide dasar dari RWG adalah kebijakan pemerintah harus mempengaruhi pola pembangungan sedemikian rupa sehingga produsen berpendapatan rendah (yang pada umumnya berlokasi terutama di sektor pertanian dan industri pedesaan berskala kecil) akan melihat peluang untuk meningkatkan pendapatan.

Strategi Pembangunan Ekonomi melalui Industrialisasi di Indonesia

Di Indonesia strategi pembangunan industri dapat dikelompokkan sebagai berikut. Pertama, **strategi substitusi impor** yang dilakukan pada tahun 1970an. Strategi industrialisasi ini berorientasi pada pemenuhan pasar dalam negeri. Salah satu ciri strategi industri substitusi impor yang dilakukan di negara-negara berkembang lebih bersifat padat modal, sehingga perannya dalam penyerapan tenaga kerja sangat minimal. Dengan demikian, proses pembangunan melalui strategi industrialisasi substitusi impor akan menghasilkan peningkatan produk-produk industri yang bias ke arah padat modal. Dapat dikatakan bahwa pembangunan ekonomi melalui strategi substitusi impor pada dasarnya lebih berorientasi kepada pertumbuhan dibanding pemerataan.

DAMPAK KEBIJAKAN EKONOMI DI SEKTOR AGROINDUSTRI TERHADAP KEMISKINAN DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN RUMAH TANGGA DI INDONESIA : Analisis Simulasi dengan Sistem Neraca Sosial Ekonomi
Sri Hery Susilowati, Bonar M. Sinaga, Wilson H. Limbong, Erwidodo

Kedua, **strategi promosi ekspor**. Pertimbangan pemerintah melakukan strategi promosi ekspor pada tahun 1980an diantaranya adalah strategi tersebut memungkinkan terciptanya arus modal internasional dan jaringan pertukaran ketrampilan, teknologi, dan manajemen. Strategi tersebut juga akan menciptakan kesempatan kerja lebih besar dibandingkan dengan strategi substitusi impor (Gillis *et al.*, 1987; Azis, 1989). Namun, dalam prakteknya penerimaan yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan ekspor hanya berupa nilai ekivalen pembayaran terhadap pekerja-pekerja lokal dan pembelian-pembelian lokal oleh perusahaan tersebut, karena ekspor yang dilakukan sebetulnya merupakan *subcontracting export* dari perusahaan luar negeri kepada afiliasinya di negara-negara lain. Dengan demikian, manfaat nilai ekspor yang dinikmati negara-negara tersebut sangat minimal (Arief, 1990).

Ketiga, **strategi *agricultural-demand-led industrialization (ADLI Strategy)***. Baik strategi substitusi impor maupun strategi promosi ekspor dipandang tidak berhasil digunakan sebagai pendekatan pembangunan di negara-negara sedang berkembang. Hal ini didasarkan pada dua faktor, yaitu pertama, kedua proses industrialisasi tersebut tidak terintegrasi dengan sektor pertanian yang menjadi sumber penghidupan sebagian besar masyarakat. Kedua, kedua strategi tersebut menghasilkan redistribusi pendapatan yang cenderung menguntungkan pemilik modal. Atas dasar tersebut strategi industrialisasi yang sesuai dikembangkan di negara-negara berkembang adalah industrialisasi yang mengutamakan pemenuhan kebutuhan masyarakat luas dan meningkatkan pendapatan masyarakat luas serta memberikan efek positif terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Mengingat sebagian besar masyarakat di negara-negara berkembang berada di sektor pertanian, maka strategi industrialisasi yang sesuai adalah strategi yang menitikberatkan program pembangunan di sektor pertanian dan menjadikan sektor pertanian sebagai penggerak pembangunan sektor industri dan sektor-sektor lain. Strategi tersebut dinamakan strategi *agricultural-demand-led industrialization (ADLI Strategy)* yang ide dasarnya dikemukakan oleh Adelman (1984). Dalam implementasinya strategi ADLI dilakukan melalui pengembangan industri yang berbasis pertanian atau agroindustri.

Keterkaitan antara Pembangunan Agroindustri dan Kemiskinan

Peran agroindustri dalam mengurangi kemiskinan dapat bersifat langsung dan tidak langsung. Secara langsung pembangunan sektor agroindustri dan pembangunan sektor pertanian secara umum akan meningkatkan produktivitas pertanian melalui peningkatan produktivitas total faktor. Peningkatan produktivitas pertanian akan meningkatkan pendapatan petani dan lebih lanjut akan menurunkan kemiskinan. Sedangkan peran secara tidak langsung adalah melalui sektor nonpertanian. Pembangunan agroindustri pada awalnya akan mempengaruhi pertumbuhan sektor pertanian dan melalui keterkaitan sektor akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara agregat

dan selanjutnya akan mengurangi kemiskinan. Komponen yang mempengaruhi produktivitas faktor diantaranya adalah kapital fisik, infrastruktur, sumberdaya manusia, pendidikan, penelitian dan pengembangan, kepadatan populasi pedesaan, serta perubahan teknologi (Binswanger *et al.*, 1987; Mundlak *et al.*, 1997; Mundlak, 1999). Dengan demikian, pemerintah melalui kebijakan fiskal berperan dalam meningkatkan produktivitas faktor.

Apakah penambahan pendapatan yang disebabkan oleh peningkatan produktivitas pertanian tersebut akan mampu mengurangi kemiskinan? Hal ini tergantung pada pola konsumsi dan investasi masyarakat. Jika penambahan pendapatan terjadi pada masyarakat golongan miskin dan dibelanjakan untuk barang-barang domestik, pertumbuhan sektor pertanian akan mendorong pertumbuhan sektor nonpertanian di pedesaan. Melalui pengganda tenaga kerja hal ini akan berdampak pada pengurangan kemiskinan. Namun, apabila hasil pembangunan pertanian menghasilkan peningkatan pendapatan bagi masyarakat golongan kaya, faktor penting yang akan mempengaruhi kemiskinan adalah kemana penambahan pendapatan tersebut dibelanjakan. Jika berupa investasi domestik yang padat tenaga kerja, maka pertumbuhan akan terjadi dan masyarakat miskin akan memperoleh manfaat dari lapangan kerja yang diciptakan. Tetapi, jika dibelanjakan untuk barang-barang impor atau diinvestasikan ke luar negeri, maka stimulus terhadap pertumbuhan akan kecil dan tidak akan berdampak positif terhadap pengurangan kemiskinan. Oleh karena itu, pola distribusi peningkatan pendapatan dari stimulus awal merupakan faktor penting bagi pertumbuhan selanjutnya dan pengurangan kemiskinan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kontribusi pembangunan sektor agroindustri terhadap pengurangan kemiskinan tergantung pada struktur pendapatan masyarakat, yaitu apakah manfaat pembangunan lebih banyak mengarah ke masyarakat golongan kaya atau sebaliknya ke masyarakat golongan miskin. Selain itu juga tergantung pada distribusi alokasi peningkatan pendapatan. Pembangunan sektor agroindustri akan mempunyai kontribusi baik bagi pertumbuhan ekonomi maupun bagi pengurangan kemiskinan, jika hasil dari stimulus produktivitas awal dibelanjakan lagi melalui investasi dan konsumsi domestik pada produk-produk yang bersifat padat tenaga kerja dan rendah ketergantungan yang pada impor.

Metode Analisis

Analisis Model Sistem Neraca Sosial Ekonomi

Analisis Dampak Kebijakan menggunakan analisis simulasi kebijakan melalui model Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) atau *Social Accounting Matrix* (SAM). Klasifikasi neraca SNSE mengacu pada BPS. Neraca rumah tangga didisagregasi ke dalam 6 golongan rumah tangga, yaitu (a) buruh tani, (b) petani, (c) nonpertanian golongan rendah di desa, (d) nonpertanian golongan

atas di desa, (e) nonpertanian golongan rendah di kota, dan (f) nonpertanian golongan atas di kota. Neraca sektor produksi dikelompokkan ke sektor primer (pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, kehutanan dan pertanian tanaman lain), sektor agroindustri dan sektor lain. Sektor agroindustri selanjutnya didisagregasi menjadi agroindustri makanan dan agroindustri nonmakanan. Agroindustri makanan didisagregasi lagi menjadi (a) agroindustri makanan sektor peternakan, (b) agroindustri makanan sektor tanaman pangan, (c) agroindustri makanan sektor perikanan, (d) agroindustri makanan sektor perkebunan, (e) industri minuman, dan (f) industri rokok. Sedangkan agroindustri nonmakanan didisagregasi ke dalam: (a) industri kapuk, (b) industri kulit samakan dan olahan, (c) industri kayu lapis, barang dari kayu, bambu dan rotan, (d) industri bubur kertas, dan (e) industri karet remah dan asap. Perlakuan disagregasi tersebut mengakibatkan neraca SNSE menjadi tidak seimbang. Untuk memenuhi syarat keseimbangan neraca digunakan metode *Cross Entrophy* (Robinson and El-Said, 1998) dengan menggunakan program GAMS 2.50. Sedangkan analisis model SNSE menggunakan program MATS (*Matrix Accounts Transformation System*).

Analisis utama dalam model SNSE adalah analisis pengganda yang dapat dinyatakan dalam persamaan matriks sebagai berikut.

$$T = M_a X \dots\dots\dots (1)$$

dimana $M_a = (I - A)^{-1}$ disebut sebagai matriks pengganda neraca (*accounting multiplier*) dan $(I - A)^{-1}$ disebut sebagai matriks kebalikan Leontief. Model tersebut menjelaskan bahwa pendapatan neraca endogen (yaitu neraca faktor produksi, neraca institusi, dan neraca sektor produksi) yang dinyatakan dalam notasi T, akan berubah sebesar M_a unit akibat adanya perubahan neraca eksogen, dinyatakan dalam notasi X sebesar satu unit. Besarnya M_a ditentukan oleh besaran koefisien *multiplier* pada matriks $(I - A)^{-1}$.

Analisis Skenario Kebijakan

Ada 12 skenario kebijakan yang dianalisis dengan model SNSE, yaitu (1) peningkatan pengeluaran anggaran pemerintah di sektor agroindustri dan pertanian primer, (2) peningkatan ekspor di sektor agroindustri, (3) peningkatan investasi di sektor agroindustri, (4) pemberian insentif pajak di sektor agroindustri, dan (5) kebijakan redistribusi pendapatan dari rumah tangga golongan atas ke rumah tangga golongan rendah yang terkait dengan sektor agroindustri. Secara rinci skenario kebijakan tersebut adalah sebagai berikut.

Skenario 1: Peningkatan pengeluaran pemerintah di sektor agroindustri sebesar 10% yang dialokasikan ke **industri makanan** dan didistribusikan secara merata ke masing-masing industri.

- Skenario 2:** Peningkatan pengeluaran pemerintah di sektor agroindustri sebesar 10% yang dialokasikan ke **industri nonmakanan** dan didistribusikan secara merata ke masing-masing industri
- Skenario 3:** Peningkatan ekspor di sektor agroindustri sebesar 7% untuk masing-masing **industri makanan**.
- Skenario 4:** Peningkatan ekspor di sektor agroindustri sebesar 7% untuk masing-masing **industri nonmakanan**.
- Skenario 5:** Kombinasi peningkatan ekspor di sektor agroindustri sebesar 7% untuk masing-masing industri makanan (skenario 3) dan peningkatan pengeluaran pemerintah 10% di sektor pertanian primer yang dialokasikan ke masing-masing subsektor secara merata.
- Skenario 6:** Kombinasi peningkatan ekspor di sektor agroindustri sebesar 7% untuk masing-masing industri nonmakanan (skenario 4) dan peningkatan pengeluaran pemerintah 10% di sektor pertanian primer yang dialokasikan ke masing-masing subsektor secara merata.
- Skenario 7:** Peningkatan investasi di sektor agroindustri sebesar 10% yang didistribusikan secara proporsional ke masing-masing **industri makanan**
- Skenario 8:** Peningkatan investasi di sektor agroindustri sebesar 10% yang didistribusikan secara proporsional ke masing-masing **industri nonmakanan**.
- Skenario 9:** Peningkatan investasi di sektor agroindustri sebesar 10% yang didistribusikan secara merata ke industri **prioritas**.
- Skenario 10:** Kombinasi peningkatan investasi di sektor agroindustri sebesar 10% yang didistribusikan secara merata ke industri **prioritas** (skenario 9) dan peningkatan pengeluaran pemerintah 10% di sektor pertanian primer yang dialokasikan ke masing-masing subsektor secara merata.
- Skenario 11:** Pemberian insentif pajak ke sektor agroindustri makanan dan nonmakanan sebesar 10%.
- Skenario 12:** Redistribusi pendapatan rumah tangga dari golongan atas ke rumah tangga buruh tani, petani kecil, rumah tangga golongan rendah di desa dan di kota sebesar seratus ribu rupiah sebulan selama setahun dan sebanyak jumlah rumah tangga miskin yang didistribusikan secara proporsional.

Hasil analisis dampak masing-masing skenario kebijakan selanjutnya digunakan untuk melakukan analisis kemiskinan dan distribusi pendapatan rumah tangga menggunakan data Susenas.

Alasan meningkatkan pengeluaran pemerintah di sektor pertanian dan agroindustri sebesar 10% adalah berdasarkan pada angka pertumbuhan pengeluaran pemerintah di sektor pertanian tahun 2003 ke tahun 2004 sebesar 13%. Pada periode yang sama, pengeluaran pemerintah di sektor industri justru mengalami pertumbuhan yang menurun. Oleh karena itu, besaran peningkatan pengeluaran pemerintah di sektor pertanian primer dan agroindustri menggunakan angka pertumbuhan yang moderat yaitu sebesar 10%. Sedangkan peningkatan ekspor agroindustri sebesar 7% didasarkan pada target pertumbuhan ekspor agroindustri sebesar 7% (Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia, 2005).

Penentuan **industri prioritas** pada Skenario 9 dan Skenario 10 adalah berdasarkan urutan atau *ranking* nilai pengganda output, tenaga kerja, keterkaitan sektor, dan pendapatan rumah tangga. Industri yang memiliki urutan tertinggi dianggap sebagai industri prioritas untuk dikembangkan. Kriteria yang digunakan untuk melakukan ranking adalah, *pertama*, berdasarkan pengganda yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu pengganda output, tenaga kerja, dan perannya dalam meningkatkan pertumbuhan sektor lain. *Kedua*, berdasarkan pengganda pendapatan rumah tangga golongan rendah, yaitu rumah tangga buruh tani, petani kecil, dan rumah tangga nonpertanian golongan rendah di desa maupun di kota. Dengan menggunakan dua kriteria tersebut, industri yang berada pada urutan teratas diharapkan memenuhi kriteria "*pro growth, pro poor and pro employment*", yaitu industri yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesempatan kerja, dan memberikan manfaat yang besar kepada golongan rumah tangga berpendapatan rendah, sehingga akan mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pendapatan rumah tangga.

Alasan mengkombinasikan skenario peningkatan ekspor dengan peningkatan pengeluaran pemerintah di sektor pertanian primer karena dengan memperluas pasar dan didukung dengan penyediaan bahan baku agroindustri yang lebih baik, diharapkan akan berdampak pada peningkatan pendapatan sektor agroindustri yang lebih besar yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan pendapatan rumah tangga. Lebih lanjut peningkatan pendapatan rumah tangga, terutama buruh tani dan petani kecil, akan berdampak menurunkan kesenjangan pendapatan rumah tangga golongan atas dan golongan rendah, mengingat dari hasil penelitian sebelumnya sektor pertanian primer menghasilkan pengganda pendapatan paling besar bagi golongan rumah tangga buruh tani dan petani kecil (Susilowati *et al.*, 2007).

Analisis Kemiskinan

Analisis kemiskinan menggunakan indeks kemiskinan FGT atau *Foster-Greer-Thorbecke* (Cockburn, 2001) dengan program *DAD 4.3: Distributive Analysis*. Indeks kemiskinan FGT dinyatakan dalam formula sebagai berikut.

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}, \text{ dimana } \alpha \geq 0 \dots\dots\dots (2)$$

dimana P adalah ukuran kemiskinan, y_i adalah rata-rata pendapatan (setara dengan konsumsi) per kapita individu ke i dalam rumah tangga yang sudah diranking berdasarkan tingkat konsumsi, z adalah garis kemiskinan sehingga *poverty gap* masing-masing individu adalah $(z - y_i)$ dan *poverty gap ratio* adalah $(z - y_i)/z$, total populasi dinyatakan sebagai n, dan jumlah populasi miskin adalah q. Formula FGT memiliki parameter α (*poverty aversion parameter*), dimana semakin besar α semakin sensitif ukuran tersebut terhadap kesejahteraan orang yang paling miskin, atau dapat dikatakan semakin besar α maka kesenjangan pendapatan antara rumah tangga miskin semakin meningkat (Ravallion, 1994).

Ada 3 nilai α yang biasa digunakan, yaitu $\alpha = \{0,1,2\}$. Jika nilai $\alpha = 0$, maka $P_0 = \text{head-count index}$, yang menunjukkan proporsi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, dihitung sebagai persentase jumlah penduduk miskin terhadap total penduduk. Jika nilai $\alpha = 1$, maka $P_1 = \text{poverty gap index}$. Indeks ini mengukur kesenjangan rata-rata pendapatan terhadap garis kemiskinan. Semakin besar nilai indeks ini semakin besar kesenjangan pendapatan penduduk miskin terhadap garis batas kemiskinan. Jika $\alpha = 2$, maka $P_2 = \text{severity poverty index}$, yaitu indeks yang sensitif terhadap distribusi pendapatan penduduk miskin dan menunjukkan intensitas kemiskinan.

Mengingat penghitungan *FGT poverty index* didasarkan pada pendapatan per kapita, sementara nilai pendapatan (ekivalen pengeluaran) dalam data Susenas adalah pendapatan rumah tangga, untuk mengkonversi nilai tersebut digunakan *Equivalence Scales (ES)*. ES merupakan ukuran ekivalen penduduk dewasa yang dihitung dengan mengkonversi seluruh anggota rumah tangga (ART) menggunakan kesetaraan. Kepala rumah tangga dihitung setara 1, anggota rumah tangga dewasa lain setara 0,7, dan anak-anak dihitung setara 0,5. Dalam analisis ini, sesuai dengan konsep BPS, anak adalah ART yang berumur dibawah 15 tahun. Formula ES adalah sebagai berikut (Cockburn, 2002).

$$ES = 1 + 0.7(Z_i - 1 - K_i) + 0.5 K_i \dots\dots\dots(3)$$

Dimana Z_i merupakan jumlah ART dewasa dalam rumah tangga ke i dan K_i adalah jumlah anak dalam rumah tangga ke i.

Analisis Distribusi Pendapatan Rumah Tangga

Hasil analisis dampak kebijakan dari model SNSE juga digunakan untuk melakukan analisis distribusi pendapatan rumah tangga dengan menggunakan

analisis dekomposisi indeks Theil (Akita *et al.*, 1999). Analisis distribusi Theil dapat dinyatakan dalam dua macam indeks yaitu berdasarkan pangsa pendapatan (T) dan berdasarkan pangsa populasi (L). Berbeda dengan indeks kesenjangan lain, indeks Theil dapat didekomposisi menjadi distribusi dalam (*within*) kelompok atau antarindividu rumah tangga (T_w dan L_w) dan distribusi antar (*between*) kelompok (T_b dan L_b). Mengingat analisis ini mengelompokkan rumah tangga ke dalam beberapa golongan rumah tangga dan dampak kebijakan akan mempengaruhi perubahan pendapatan masing-masing golongan, maka indeks Theil sangat tepat digunakan untuk keperluan analisis ini. Indeks Theil dinyatakan dalam formula sebagai berikut.

$$T = \sum_i \left(\frac{Y_i}{Y} \right) T_i + \sum_i \left(\frac{Y_i}{Y} \right) \log \left(\frac{Y_i / Y}{n_i / n} \right) = T_w + T_b \dots\dots\dots (4)$$

dan

$$L = \sum_i \left(\frac{n_i}{n} \right) L_i + \sum_i \left(\frac{n_i}{n} \right) \log \left(\frac{n_i / n}{Y_i / Y} \right) = L_w + L_b \dots\dots\dots (5)$$

dimana

$$T_i = \sum_j \left(\frac{Y_{ij}}{Y_i} \right) \log \left(\frac{Y_{ij} / Y_i}{n_{ij} / n_i} \right) \dots\dots\dots (6)$$

$$L_i = \sum_j \left(\frac{n_{ij}}{n_i} \right) \log \left(\frac{n_{ij} / n_i}{Y_{ij} / Y_i} \right) \dots\dots\dots (7)$$

Y_i adalah total pendapatan rumah tangga dalam kelompok *i*, dan n_i adalah jumlah total rumah tangga dalam kelompok *i* (= $\sum_j n_{ij}$).

Jenis dan Sumber Data

Data utama yang digunakan adalah data SNSE dan Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) . Neraca SNSE yang digunakan adalah neraca tahun 2003, merupakan *updating* dari neraca tahun 2002 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Selain menggunakan dua data utama tersebut, untuk melakukan disagregasi sektor industri ke dalam sektor agroindustri dan industri lainnya, digunakan data-data pendukung diantaranya tabel Input-Output Indonesia, Statistik Industri serta data-data lain yang relevan. Sebagian besar data bersumber dari BPS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Kebijakan Agroindustri terhadap Pendapatan Rumah Tangga

Kebijakan di sektor agroindustri berupa stimulus ekonomi baik peningkatan investasi atau peningkatan pengeluaran pemerintah akan meningkatkan output sektor agroindustri. Melalui keterkaitan antarsektor lebih lanjut hal ini akan meningkatkan pertumbuhan output sektor ekonomi lainnya. Peningkatan output akan mendorong peningkatan permintaan tenaga kerja, baik tenaga kerja pertanian maupun nonpertanian dan permintaan terhadap modal yang dipenuhi oleh rumah tangga dan perusahaan. Hal ini akan berdampak lebih lanjut pada peningkatan pendapatan rumah tangga dan perusahaan. Proses ini akan terus berlangsung melalui efek pengganda (*multiplier effect*).

Kebijakan yang ditujukan ke sektor agroindustri dibedakan atas kebijakan ke agroindustri makanan, kebijakan ke agroindustri nonmakanan, dan kebijakan yang ditujukan ke **industri-industri prioritas**, yaitu industri yang memiliki ranking tertinggi berdasarkan nilai pengganda output, tenaga kerja, peran terhadap sektor serta pengganda pendapatan rumah tangga golongan rendah, yaitu rumah tangga buruh tani, petani kecil, dan rumah tangga nonpertanian golongan rendah di desa maupun di kota. Dengan menggunakan indikator pengganda tersebut, industri yang berada pada urutan teratas diharapkan mewakili industri yang memenuhi kriteria ***triple track: pro growth, pro poor, and pro employment***, yaitu industri-industri yang dapat memacu pertumbuhan dan menciptakan kesempatan kerja sekaligus mengurangi kemiskinan dan memperbaiki distribusi pendapatan. Dari penelitian sebelumnya diketahui agroindustri yang berada pada lima urutan teratas dan disebut sebagai industri prioritas adalah industri karet remah dan asap, industri rokok, industri kayu lapis bambu dan rotan, industri minuman dan industri makanan sektor perikanan (Susilowati *et al.*, 2007).

Perubahan pendapatan rumah tangga dari berbagai skenario terhadap **simulasi dasar** (sebelum dilakukan simulasi) menurut golongan rumah tangga disajikan pada Tabel 1. Dari 12 skenario kebijakan yang dilakukan, peningkatan investasi di agroindustri prioritas (Skenario 9) dan mengkombinasikan kebijakan tersebut dengan peningkatan pengeluaran pemerintah di sektor pertanian primer (Skenario 10) merupakan kebijakan yang menghasilkan peningkatan pendapatan rumah tangga paling besar.

Sebaliknya kebijakan peningkatan pengeluaran pemerintah di sektor agroindustri makanan (Skenario 1) dan agroindustri nonmakanan (Skenario 2) tidak menghasilkan peningkatan pendapatan rumah tangga yang cukup berarti. Hal ini karena disamping peningkatan 10 % anggaran pembangunan tersebut secara nominal jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan jumlah nominal investasi swasta, juga karena alokasi pengeluaran pembangunan pemerintah tidak hanya untuk peningkatan modal secara fisik melalui penyertaan modal

pada BUMN, tetapi juga untuk biaya proyek-proyek penelitian serta pengeluaran pembangunan melalui instruksi presiden (inpres). Hal itu mengurangi dampak langsung terhadap peningkatan output sektor, dan lebih lanjut terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga.

Sedangkan peningkatan ekspor di sektor agroindustri makanan (Skenario 3) dan agroindustri nonmakanan (Skenario 4) berdampak terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga lebih kecil dibandingkan dampak kebijakan peningkatan investasi. Dampak peningkatan ekspor pada dasarnya merupakan efek dari kebijakan peningkatan investasi agroindustri yang menghasilkan komoditi *tradable* dimana peningkatan investasi akan berdampak peningkatan produksi untuk ekspor. Namun, apabila peningkatan ekspor tersebut merupakan target ekspor, maka hal ini harus diikuti dengan upaya lain yang dapat mendorong ekspor, misalnya melakukan perluasan pasar, mengaktifkan pendekatan ke pihak yang memiliki saluran distribusi ke luar negeri yang bagus, juga upaya-upaya yang mengarah pada perbaikan mutu produk serta diversifikasi produk olahan untuk meningkatkan nilai tambah ekspor.

Tabel 1. Dampak Kebijakan Agroindustri terhadap Pendapatan Rumah Tangga Tahun 2003 (%)

Simulasi ¹	Golongan Rumah tangga					
	Buruh Tani	Petani	Nonpertanian			
			Rendah Desa	Atas-Desa	Rendah Kota	Atas Kota
DASAR ² (Rp)	180.740	207.470	242.780	326.480	408.934	632.381
Skenario 1	0,019	0,019	0,016	0,017	0,014	0,014
Skenario 2	0,018	0,017	0,016	0,017	0,016	0,016
Skenario 3	0,460	0,471	0,376	0,414	0,314	0,323
Skenario 4	0,511	0,475	0,466	0,472	0,457	0,461
Skenario 5	0,531	0,549	0,428	0,476	0,353	0,364
Skenario 6	0,527	0,489	0,478	0,486	0,468	0,472
Skenario 7	0,545	0,557	0,448	0,492	0,375	0,385
Skenario 8	0,528	0,493	0,479	0,488	0,466	0,471
Skenario 9	1,325	1,264	1,175	1,218	1,086	1,096
Skenario 10	1,408	1,353	1,236	1,290	1,133	1,145
Skenario 11	0,375	0,378	0,312	0,339	0,269	0,275
Skenario 12	0,390	0,674	0,077	-1,898	0,039	-0,145
Rata-rata	0,553	0,562	0,459	0,318	0,416	0,406

Kode skenario dapat dilihat pada Bab Metode Analisis.

¹ Nilai pendapatan rumah tangga menurut skenario adalah nilai **perubahan** antara pendapatan simulasi dasar dengan pendapatan masing –masing skenario.

² Nilai pendapatan rumah tangga sebelum dilakukan simulasi.

Kebijakan pemberian insentif pajak kepada perusahaan agroindustri (Skenario 11) terhadap peningkatan output sektoral mempunyai hubungan yang bersifat tidak langsung, tetapi melalui peningkatan investasi. Pemberian insentif pajak diharapkan akan memotivasi investor untuk berinvestasi lebih banyak sehingga sektor agroindustri akan berkembang. Kebijakan ini diimplementasikan melalui Peraturan Pemerintah No.1 tahun 2007 yang memberikan insentif PPh kepada 15 industri termasuk beberapa agroindustri. Oleh karena mempunyai hubungan tidak langsung kebijakan tersebut menghasilkan dampak lebih kecil terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga dibandingkan kebijakan peningkatan investasi maupun kebijakan ekspor. Namun, sesungguhnya kebijakan tersebut merupakan kebijakan strategis untuk mendorong peningkatan investasi. Sedangkan kebijakan untuk melakukan redistribusi pendapatan dari rumah tangga golongan atas ke rumah tangga golongan rendah (Skenario 12) mengakibatkan penurunan pendapatan rumah tangga nonpertanian golongan atas di desa dengan persentase yang jauh lebih besar dibandingkan peningkatan pendapatan yang diperoleh rumah tangga golongan rendah.

Tabel 1 menunjukkan pula bahwa dampak kebijakan di sektor agroindustri meningkatkan pendapatan rumah tangga buruh tani dan petani paling besar. Hal ini membuktikan bahwa pembangunan agroindustri akan mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga buruh tani dan petani. Apabila dewasa ini sekitar 69 persen kemiskinan berada di sektor pertanian dan pedesaan, maka pembangunan agroindustri diyakini merupakan cara efektif untuk mengurangi kemiskinan.

Dampak Kebijakan Agroindustri terhadap Kemiskinan Rumah Tangga

Nilai dasar indeks kemiskinan (*headcount index*) dan perubahan indeks kemiskinan menurut berbagai skenario kebijakan disajikan pada Tabel 2. Dengan menuliskan *headcount* indeks dalam persentase, *headcount index* nilai dasar (sebelum dilakukan simulasi kebijakan) untuk golongan rumah tangga buruh tani sebesar 3,8 persen sedangkan untuk golongan rumah tangga petani sebesar 3,4 persen. Artinya, sekitar 3,8 persen penduduk yang berada pada golongan rumah tangga buruh tani dan 3,4 persen penduduk pada golongan rumah tangga petani adalah miskin, atau memiliki pendapatan per kapita di bawah garis batas kemiskinan.

Perubahan indeks kemiskinan terhadap nilai dasar konsisten dengan dampak kebijakan terhadap pendapatan rumah tangga, dimana peningkatan investasi agroindustri 10 persen yang dialokasikan hanya ke industri-industri prioritas secara merata (Skenario 9) dan mengkombinasikan kebijakan tersebut dengan peningkatan pengeluaran pemerintah di sektor pertanian primer (Skenario 10) merupakan skenario kebijakan yang paling efektif untuk menurunkan kemiskinan dibandingkan skenario lainnya. Peningkatan investasi

ke industri prioritas tersebut dapat menurunkan tingkat kemiskinan pada golongan rumah tangga buruh tani sekitar 0,4 persen dari total jumlah rumah tangga buruh tani. Jika diperhatikan lebih lanjut antara Skenario 9 dengan Skenario 10 tidak menghasilkan perbedaan indeks kemiskinan pada golongan rumah tangga buruh tani dan nonpertanian golongan rendah di desa. Artinya, mengkombinasikan kebijakan peningkatan investasi di agroindustri dan pengeluaran pemerintah di sektor pertanian primer (Skenario 10) untuk menjamin ketersediaan bahan baku industri tidak berbeda dampaknya dengan kebijakan tunggal peningkatan investasi pada industri prioritas (Skenario 9) dalam menurunkan kemiskinan. Hal ini disebabkan penambahan pendapatan yang disebabkan oleh peningkatan pengeluaran pemerintah di sektor primer tidak cukup besar untuk mengurangi kesenjangan rata-rata pendapatan rumah tangga terhadap garis batas kemiskinan.

Tabel 2. Dampak Kebijakan Agroindustri terhadap Kemiskinan (*Headcount Index*) Tahun 2003 (%)

Simulasi ¹	Golongan Rumah tangga					
	Buruh Tani	Petani	Nonpertanian			
			Rendah Desa	Atas Desa	Rendah Kota	Atas Kota
DASAR ² (Rp)	3.762	3.430	2.375	0.602	2.180	0.425
Skenario 1	0,000	-0,005	0,000	0,000	0,000	0,000
Skenario 2	0,000	-0,005	0,000	0,000	0,000	0,000
Skenario 3	-0,191	-0,066	-0,100	0,000	-0,032	0,000
Skenario 4	-0,238	-0,066	-0,110	-0,055	-0,053	0,000
Skenario 5	-0,238	-0,071	-0,100	-0,055	-0,037	0,000
Skenario 6	-0,238	-0,066	-0,110	-0,110	-0,053	-0,020
Skenario 7	-0,238	-0,071	-0,110	-0,110	-0,043	0,000
Skenario 8	-0,238	-0,066	-0,110	-0,110	-0,053	0,000
Skenario 9	-0,381	-0,267	-0,160	-0,110	-0,154	-0,020
Skenario 10	-0,381	-0,283	-0,160	-0,164	-0,160	-0,020
Skenario 11	-0,143	-0,061	-0,080	-0,164	-0,027	0,000
Skenario 12	-0,143	-0,096	-0,010	0,055	-0,005	0,000

Kode skenario dapat dilihat pada Bab Metode Analisis.

¹ Nilai *headcount index* menurut skenario adalah nilai **perubahan** antara indeks simulasi dasar dengan indeks masing – masing skenario.

² Nilai *headcount index* sebelum dilakukan simulasi.

Apabila peningkatan investasi dialokasikan ke seluruh agroindustri makanan (Skenario 7) dan agroindustri nonmakanan secara proporsional (Skenario 8), akan menurunkan tingkat kemiskinan rumah tangga buruh tani lebih kecil, hanya sekitar 0,24 persen. Oleh karena itu, apabila tujuan utama kebijakan adalah mengurangi kemiskinan, maka peningkatan investasi ke agroindustri karet, rokok, kayu lapis, minuman, dan industri makanan sektor perikanan akan lebih efektif dibandingkan skenario kebijakan lainnya. Skenario peningkatan ekspor agroindustri makanan (Skenario 3) dan nonmakanan (Skenario 4) akan menurunkan tingkat kemiskinan lebih kecil dibandingkan peningkatan investasi. Namun peningkatan ekspor agroindustri makanan atau nonmakanan yang didukung oleh peningkatan penyediaan bahan baku industri (Skenario 5 atau Skenario 6) akan mengurangi kemiskinan lebih besar dibandingkan apabila kebijakan dilakukan secara tunggal. Tabel 2 menunjukkan pula bahwa peningkatan investasi dan ekspor yang ditujukan ke agroindustri nonmakanan dapat menurunkan tingkat kemiskinan relatif lebih besar dibandingkan bila kebijakan yang sama ditujukan ke agroindustri makanan.

Alternatif skenario lain adalah meningkatkan pengeluaran pembangunan pemerintah di sektor agroindustri makanan (Skenario 1) dan nonmakanan (Skenario 2). Kebijakan ini relatif lebih fleksibel dan secara operasional relatif lebih mudah dilakukan namun dampak terhadap penurunan tingkat kemiskinan kurang efektif. Tingkat kemiskinan dapat diturunkan hanya untuk rumah tangga petani dan tidak berdampak terhadap golongan rumah tangga lain. Skenario lain adalah melalui kebijakan perpajakan (Skenario 11). Pemberian insentif pajak agroindustri sebesar 10% akan menurunkan tingkat kemiskinan relatif lebih kecil dibandingkan skenario peningkatan investasi dan ekspor. Skenario terakhir (Skenario 12) adalah melakukan redistribusi pendapatan dari rumah tangga golongan atas ke rumah tangga golongan rendah (kelompok buruh tani, petani kecil, dan rumah tangga golongan rendah di desa dan kota) melalui bantuan langsung tunai sebanyak seratus ribu rupiah per bulan selama setahun dan sejumlah rumah tangga miskin, sebaliknya mengurangi pendapatan rumah tangga golongan atas di desa dan di kota dengan jumlah yang sama secara proporsional. Skenario ini efektif memperbaiki distribusi pendapatan rumah tangga dan mengurangi kemiskinan golongan rumah tangga buruh tani, petani dan dan golongan rendah, tetapi meningkatkan kemiskinan rumah tangga golongan atas di desa. Kebijakan ini juga secara agregat menurunkan output nasional sebesar 0,019 persen.

Tabel 3 menunjukkan indeks *poverty gap*. Kebijakan agroindustri berdampak terhadap menurunnya indeks *poverty gap*, namun seperti halnya pada *headcount index*, tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Hal ini berarti kesenjangan pendapatan penduduk miskin terhadap garis kemiskinan tidak banyak terpengaruh oleh kebijakan tersebut. Apabila diperhatikan lebih seksama Skenario 10 yaitu kebijakan peningkatan investasi yang dialokasikan ke industri prioritas justru akan meningkatkan indeks *poverty gap* untuk rumah

tangga golongan atas di desa dan di kota. Hal ini berlawanan dengan dampak skenario kebijakan lain. Dari 12 skenario kebijakan, Skenario 12 yaitu kebijakan redistribusi pendapatan dari rumah tangga golongan atas ke rumah tangga golongan bawah akan menurunkan indeks *poverty gap* paling besar dibanding kebijakan lainnya. Sedangkan untuk indeks *poverty severity* (Tabel 4), dampak kebijakan agroindustri menunjukkan bahwa golongan rumah tangga yang paling terpengaruh dengan adanya kebijakan agroindustri adalah rumah tangga buruh tani. Hal ini dilihat dari nilai perubahan *poverty severity index* terhadap nilai dasar yang menunjukkan angka paling besar. Artinya kebijakan agroindustri mempengaruhi distribusi pendapatan rumah tangga miskin pada golongan buruh tani yang menjurus pada kesenjangan yang mengecil. Namun untuk golongan rumah tangga nonpertanian golongan atas di kota, Skenario 10 justru meningkatkan indeks *poverty severity*.

Tabel 3. Dampak Kebijakan Agroindustri Terhadap *Poverty Gap Index* Tahun 2003 (%)

Simulasi ¹	Golongan Rumah tangga					
	Buruh Tani	Petani	Nonpertanian			
			Rendah Desa	Atas Desa	Rendah Kota	Atas Kota
DASAR ²	0,4077	0,4260	0,3037	0,0495	0,3009	0,0511
Skenario 1	-0,001	-0,001	0,000	0,000	0,000	0,000
Skenario 2	-0,001	-0,001	0,000	0,000	0,000	0,000
Skenario 3	-0,015	-0,014	-0,008	-0,002	-0,006	-0,001
Skenario 4	-0,017	-0,014	-0,009	-0,005	-0,008	-0,002
Skenario 5	-0,017	-0,016	-0,009	-0,007	-0,007	-0,001
Skenario 6	-0,017	-0,015	-0,010	-0,010	-0,009	-0,002
Skenario 7	-0,018	-0,017	-0,009	-0,012	-0,007	-0,001
Skenario 8	-0,017	-0,014	-0,009	-0,014	-0,008	-0,002
Skenario 9	-0,012	-0,011	-0,006	-0,015	-0,005	-0,001
Skenario 10	-0,013	-0,020	-0,002	0,012	-0,001	0,001
Skenario 11	-0,042	-0,037	-0,023	-0,012	-0,020	-0,004
Skenario 12	-0,044	-0,039	-0,024	-0,018	-0,020	-0,004

Kode skenario dapat dilihat pada Bab Metode Analisis.

¹ Nilai *poverty gap index* menurut skenario adalah nilai **perubahan** antara indeks simulasi dasar dengan indeks masing-masing skenario.

² Nilai *poverty gap index* sebelum dilakukan simulasi.

Tabel 4. Dampak Kebijakan Agroindustri terhadap *Poverty Severity Index* Tahun 2003 (%)

Simulasi ¹	Golongan Rumah tangga					
	Buruh Tani	Petani	Nonpertanian			
			Rendah Desa	Atas Desa	Rendah Kota	Kota
DASAR ²	0,0933	0,0912	0,0660	0,0069	0,0692	0,0090
Skenario 1	-0,021	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Skenario 2	-0,021	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Skenario 3	-0,024	-0,003	-0,002	0,000	-0,001	0,000
Skenario 4	-0,024	-0,003	-0,002	-0,001	-0,002	0,000
Skenario 5	-0,024	-0,004	-0,002	-0,001	-0,002	0,000
Skenario 6	-0,024	-0,003	-0,002	-0,001	-0,002	0,000
Skenario 7	-0,024	-0,004	-0,002	-0,002	-0,002	0,000
Skenario 8	-0,024	-0,003	-0,002	-0,002	-0,002	0,000
Skenario 9	-0,023	-0,002	-0,001	-0,002	-0,001	0,000
Skenario 10	-0,023	-0,004	0,000	0,002	0,000	0,000
Skenario 11	-0,029	-0,008	-0,005	-0,002	-0,005	-0,001
Skenario 12	-0,030	-0,009	-0,006	-0,003	-0,005	-0,001

Kode skenario dapat dilihat pada Bab Metode Analisis.

¹ Nilai *povertyseverity index* menurut skenario adalah nilai **perubahan** antara indeks simulasi dasar dengan indeks masing – masing skenario.

² Nilai *poverty severity index* sebelum dilakukan simulasi.

Dampak Kebijakan Agroindustri terhadap Distribusi Pendapatan Rumah Tangga

Seperti halnya dampak terhadap kemiskinan, skenario kebijakan meningkatkan investasi agroindustri yang dialokasikan ke industri-industri prioritas dikombinasikan dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah di sektor pertanian primer (Skenario 9 dan Skenario10) lebih dapat memperbaiki distribusi pendapatan antargolongan rumah tangga dibandingkan skenario kebijakan lainnya (Tabel 5). Kombinasi kebijakan ini dapat lebih memperbaiki distribusi pendapatan dibandingkan kebijakan tunggal peningkatan investasi karena stimulus ekonomi yang diberikan ke sektor pertanian primer akan menghasilkan nilai pengganda pendapatan rumah tangga buruh tani dan petani terbesar. Oleh karena itu, dampak stimulus ekonomi akan lebih mengarah ke rumah tangga buruh tani dan petani, dan lebih lanjut akan memperkecil kesenjangan pendapatan antara golongan atas dan rendah.

DAMPAK KEBIJAKAN EKONOMI DI SEKTOR AGROINDUSTRI TERHADAP KEMISKINAN DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN RUMAH TANGGA DI INDONESIA : Analisis Simulasi dengan Sistem Neraca Sosial Ekonomi
Sri Hery Susilowati, Bonar M. Sinaga, Wilson H. Limbong, Erwidodo

Tabel 5. Dampak Kebijakan di Sektor Agroindustri terhadap Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Tahun 2003

SIMULASI ¹	THEIL-T			THEIL-L		
	Total	<i>Between</i>	<i>Within</i>	Total	<i>Between</i>	<i>Within</i>
DASAR ²	0.14591 (100)	0.03813 (26)	0.10778 (74)	0.11459 (100)	0.03607 (32)	0.07852 (68)
Skenario 1	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Skenario 2	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Skenario 3	-0,00012	-0,00010	-0,00002	-0,00010	-0,00010	0,00000
Skenario 4	-0,00001	-0,00001	0,00000	-0,00001	-0,00001	0,00000
Skenario 5	-0,00014	-0,00012	-0,00002	-0,00012	-0,00012	0,00000
Skenario 6	-0,00002	-0,00001	0,00000	-0,00002	-0,00002	0,00000
Skenario 7	-0,00013	-0,00011	-0,00002	-0,00012	-0,00012	0,00000
Skenario 8	-0,00003	-0,00002	0,00000	-0,00002	-0,00002	0,00000
Skenario 9	-0,00014	-0,00012	-0,00002	-0,00012	-0,00012	0,00000
Skenario 10	-0,00017	-0,00014	-0,00003	-0,00015	-0,00015	0,00000
Skenario 11	-0,00008	-0,00007	-0,00001	-0,00007	-0,00007	0,00000
Skenario 12	-0,00049	-0,00043	-0,00006	-0,00045	-0,00045	0,00000

Kode skenario dapat dilihat pada Bab Metode Analisis.

Angka dalam kurung adalah nilai persentase terhadap indeks Theil Total.

¹ Nilai indeks Theil menurut skenario adalah nilai **perubahan** antara indeks simulasi dasar dengan indeks simulasi masing-masing skenario.

² Nilai indeks Theil sebelum dilakukan simulasi kebijakan.

Kebijakan peningkatan ekspor dan investasi di sektor agroindustri makanan (Skenario 3 dan Skenario 7) secara umum dapat lebih memperbaiki distribusi pendapatan dibandingkan kebijakan ekspor dan investasi di agroindustri nonmakanan (Skenario 4 dan Skenario 8) karena stimulus ekonomi ke agroindustri makanan akan menghasilkan nilai pengganda pendapatan tertinggi bagi rumah tangga buruh tani, petani, dan rumah tangga nonpertanian golongan rendah. Demikian pula apabila penyediaan bahan baku ditingkatkan sekaligus juga meningkatkan ekspor agroindustri, akan lebih memperbaiki distribusi pendapatan antargolongan rumah tangga. Terlebih apabila kebijakan ditujukan di agroindustri makanan.

Kebijakan insentif pajak (Skenario 11) menghasilkan indeks kesenjangan yang lebih besar dibandingkan kebijakan investasi. Kebijakan meningkatkan pengeluaran pemerintah di sektor agroindustri makanan dan nonmakanan sebesar 10 persen, (Skenario 1 dan Skenario 2) seperti halnya pada kemiskinan, tidak menghasilkan perubahan terhadap distribusi pendapatan

antargolongan rumah tangga. Sementara kebijakan redistribusi pendapatan dari rumah tangga golongan atas ke rumah tangga golongan rendah (Skenario 12) merupakan skenario kebijakan yang paling efektif mengurangi kesenjangan pendapatan antargolongan rumah tangga, tetapi di sisi lain menghasilkan dampak yang relatif kecil terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Secara umum perubahan indeks kesenjangan untuk seluruh skenario menunjukkan angka yang relatif kecil. Hal ini memberikan pemahaman bahwa untuk menurunkan kesenjangan pendapatan rumah tangga diperlukan berbagai kebijakan yang dilakukan secara simultan dan memerlukan proses waktu. Sebagai gambaran, ukuran ketimpangan pendapatan yang dilakukan oleh Etharina (2005) menggunakan metode yang sama untuk mengukur perkembangan ketimpangan pendapatan antara kelompok penduduk Jawa dan Luar Jawa, diperoleh angka indeks ketimpangan tahun 1996 sebesar 0,0762 meningkat menjadi 0,0766 pada tahun 2001. Artinya, selama periode lima tahun, indeks ketimpangan meningkat hanya sebesar 0,0004. Demikian pula hasil kajian Akita (1999) yang menunjukkan indeks kesenjangan pendapatan Theil T antargolongan rumah tangga kota dan desa selama periode 1987 ke 1993 meningkat dari 0,055 menjadi 0,063 atau meningkat 0,008. Dengan gambaran tersebut perubahan indeks kesenjangan yang terjadi meskipun kecil, tetap relevan untuk dianalisis. Arah dari perubahan kesenjangan yang terjadi dengan demikian menjadi lebih penting untuk dipahami.

Apabila dikaitkan dengan dampak kebijakan terhadap kemiskinan, dari berbagai kebijakan yang ditujukan ke agroindustri makanan dan nonmakanan, menghasilkan pola yang sama. Kebijakan di sektor agroindustri nonmakanan menghasilkan penurunan tingkat kemiskinan lebih besar dibandingkan kebijakan di sektor agroindustri makanan. Namun, penurunan tingkat kemiskinan yang lebih besar tersebut menghasilkan *trade off* terhadap penurunan tingkat kesenjangan yang lebih.

Dengan melakukan dekomposisi indeks Theil ke dalam kesenjangan antar (*between*) dan dalam (*within*) golongan, dapat diketahui kesenjangan pendapatan rumah tangga yang terjadi lebih banyak disumbang oleh kesenjangan di dalam golongan atau kesenjangan pendapatan antarrumah tangga itu sendiri. Dalam hal ini kesenjangan pendapatan dalam golongan menyumbang sekitar 74 persen dari total kesenjangan yang diukur dengan indeks Theil-T. Sedangkan kesenjangan antar (*between*) golongan, misalnya kesenjangan antarburuh tani dengan petani atau golongan lainnya, hanya menyumbang sekitar 26 persen. Namun dilihat persentase perubahan kesenjangan yang terjadi, perubahan kesenjangan antarkelompok memberikan kontribusi perubahan yang jauh lebih besar dibandingkan perubahan kesenjangan dalam kelompok. Hal ini berarti bahwa kebijakan ekonomi yang berdampak terhadap perubahan pendapatan rumah tangga dengan proporsi yang sama tidak akan menyebabkan perubahan berarti terhadap kesenjangan pendapatan antarrumah tangga itu sendiri (kesenjangan *within* atau dalam

kelompok). Dengan demikian menjadi penting melakukan dekomposisi kesenjangan untuk melihat dampak suatu kebijakan terhadap distribusi pendapatan antargolongan rumah tangga maupun antar rumah tangga itu sendiri.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

Dampak kebijakan peningkatan ekspor, investasi dan insentif pajak di sektor agroindustri meningkatkan pendapatan rumah tangga golongan buruh tani dan petani paling besar dibandingkan dengan peningkatan pendapatan golongan rumah tangga lainnya

Kebijakan peningkatan ekspor, investasi, dan insentif pajak di sektor agroindustri berdampak mengurangi tingkat kemiskinan dan memperbaiki distribusi pendapatan rumah tangga. Sedangkan kebijakan peningkatan pengeluaran pemerintah di sektor agroindustri kurang menunjukkan pengaruh. Kebijakan redistribusi pendapatan dari golongan atas ke golongan rendah paling efektif mengurangi tingkat kesenjangan rumah tangga namun kebijakan ini secara agregat menurunkan output nasional atau menghasilkan *trade off 'equity vs growth'*.

Kebijakan di sektor agroindustri nonmakanan akan menurunkan tingkat kemiskinan lebih besar dibandingkan kebijakan di sektor agroindustri makanan. Sebaliknya kebijakan di sektor agroindustri makanan akan menurunkan tingkat kesenjangan pendapatan rumah tangga lebih besar.

Kebijakan peningkatan investasi di sektor agroindustri akan berdampak lebih besar meningkatkan pendapatan rumah tangga, menurunkan tingkat kemiskinan, dan memperbaiki distribusi pendapatan rumah tangga, jika dialokasikan di sektor agroindustri prioritas (industri karet, industri kayu lapis, bambu dan rotan, industri rokok, industri minuman, dan industri pengolahan makanan sektor perikanan).

Implikasi Kebijakan

Untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pendapatan rumah tangga, maka pemerintah perlu melakukan kebijakan untuk mendorong peningkatan investasi kebijakan dan insentif pajak di sektor agroindustri yang bertujuan ekspor.

Kebijakan ekspor, investasi dan insentif pajak di sektor agroindustri akan lebih efektif jika difokuskan di agroindustri prioritas (industri industri karet, industri kayu lapis, bambu dan rotan, industri rokok, industri minuman, dan industri pengolahan makanan sektor perikanan).

DAFTAR PUSTAKA

- Adelman, I. 1984. Beyond Export-Led Growth. *World Development*, 12 (9): 973-986.
- Akita, T., R.A. Lukman and Y. Yamada. 1999. Inequality in the Distribution of Household Expenditure in Indonesia: A Theil Decomposition Analysis. *The Developing Economies*, 37 (2) : 197-221.
- Arif, S. 1990. Dari Prestasi Pembangunan Sampai Ekonomi Politik: Kumpulan Karangan. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Arndt, H.W. 1987. Pembangunan Ekonomi. Studi Tentang Sejarah Pemikiran. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial. Jakarta.
- Azis, I. J. 1989. Export Performance and Employment Effect. Inter University Center Economics University of Indonesia. Jakarta.
- Binswanger, H., M.C. Yang, A. Bowers, and Y. Mundlak. 1987. On the Determinants of Cross-Country Aggregat Agricultural Supply. *Journal of Econometrics*, 36: 111-131.
- BPS. 2002. Statistik Indonesia. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- BPS. 2006. Statistik Industri Besar dan Sedang Indonesia 2004. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- Chenery, H., Ahluwalia, Bell, Duloy and Jolly. 1974. Redistribution with Growth. Oxford University Press. Oxford
- Cockburn, J. 2001. Trade Liberalisation and Poverty in Nepal. A Computable General Equilibrium Micro Simulation Analysis. Centre for the Study of African Economies and Nuffield College (Oxford University) and CREFA. jcoc@ecn.ulaval.ca
- Daryanto, A and J.B. Morison. 1992. Structural Interdependence in the Indonesian Economy, with Emphasis on The Agricultural Sector, 1971-1985: An Input-Output Analysis. *Mimbar Sosek*, 6 : 74 - 99
- Deliarnov. 1995. Perkembangan Pemikiran Ekonomi. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia. 2005. Kebijakan Pengembangan Industri Agro dan Kimia Tahun 2006. Departemen Perindustrian. Jakarta.
- Djojohadikusumo, S. 1994. Perkembangan Pemikiran Ekonomi. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Etharina. 2005. Disparitas Pendapatan Antardaerah di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Ekonomi* 1(1):59-74.
- Gillis, M., D.H. Perkins, M. Romer and D.R. Snodgrass. 1987. *Economics of Development*. Second Edition. W.W. Norton & Company. New York.
- Herrick, B. and C.P. Kindleberger. 1988. *Economic Development*. McGraw-Hill International Book Company. Singapore
- Kasliwal, P. 1995. *Development Economics*. South-Western College Publishing. Ohio.
- Lewis, W.A. 1954. *Economic Development with Unlimited Supplies of Labour* In Chenery and Srinivasan (Editors). *Handbook of Development Economics Science* Publisher B.V. Amsterdam.

DAMPAK KEBIJAKAN EKONOMI DI SEKTOR AGROINDUSTRI TERHADAP KEMISKINAN DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN RUMAH TANGGA DI INDONESIA : Analisis Simulasi dengan Sistem Neraca Sosial Ekonomi
Sri Hery Susilowati, Bonar M. Sinaga, Wilson H. Limbong, Erwidodo

- Mundlak, Y., D.F. Larson and R. Butzer (1997). The Determinants of Agricultural Production: A Cross Country Analysis. Policy Research Working Paper 1827. World Bank. Washington, D.C.
- Robinson, S. and M. El-Said.1998. Estimating A Social Accounting Matrix Using Cross Entropy Methods. TMD Discussion Paper No. 33. IFPRI. Washington, D.C.
- Susilowati, S.H., B. M. Sinaga, W.H. Limbong dan Erwidodo. 2007. Peran Agroindustri dalam Perekonomian Indonesia: Analisis Sistem Neraca Sosial Ekonomi. Forum Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor (*forthcoming*).